

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 67
- Apeldoorn, V., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990)
- Azis, Ziski, dkk, *Pepajakan Teori dan Kasus*, (Medan: CV Madenatera, 2016)
- Garnett, Bryan A., *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, (Minnesota: West Group, 1999)
- Handoko, D., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitsensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, Cetakan Pertama, 2017)
- Karim, H., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Kusdarini, Eny, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Yogyakarta: Penerbit UNY Press, 2011)
- Manan, A., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011)
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum cetakan ke-11*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Mertokusumo, S., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019
- Rahardjo, S., *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Rahardjo, S., *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010)

- Rahardjo, S., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011)
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010)
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Strauss A., dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru* (Jakarta: PT Indeks, 2012)
- Sunggono, B., *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Waluyo, B., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

B. Jurnal

- Atmaja, Dewa Gede, 2018, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018
- Ahmad, C. F., *Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Berupa Bantuan atau Sumbangan dan Hibah*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018
- Inelda, Lusi, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PAJAK PENGHASILAN) Pasal 29 dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal Pada PT. Praja Mandiri Lubuklinggau*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017)
- Muliadi, Ahmad, *Makalah Politik Hukum*, SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012

- Nuryadi, Deni, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure, Vol. 1 No. 2, 2016
- Rahardjo, S., *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2005
- Rantika, Ririn, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)
- Suarda, Paripura P, *et. al.*, *Penilaian terhadap Kesesuaian antara Penetapan Bea Keluar atas Ekspor Mineral dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Ekonomis*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 3, 2016
- Tjandra, Willy Riawan, *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus November, 2011
- Wantu, Fence M., *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, 2007
- Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah